

ORASI ILMIAH

Prof. Dr. Atih Rohaeti Dariah, SE., M.Si

dalam rangka Pengukuhan Guru Besar Unisba
Senin, 15 November 2021 - Aula Utama Unisba

**Inspirasi Nilai-nilai Islam
dalam Pencapaian SDGs**



unisba
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG



Bismillaahirrohmaanirrahiim

*Assalamu'alaikum Warahmatuulaahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,*

Yang saya hormati,

- ✓ Dirjen Dikti Kemdikbudristek
- ✓ Gubernur Jawa Barat atau yang mewakili
- ✓ Kepala LL Dikti Wilayah IV
- ✓ Walikota Bandung atau yang mewakili
- ✓ Para Guru Besar Tamu yang hadir di aula dan Para Guru besar di lingkungan LLDikti Wilayah IV Jabar Banten
- ✓ Para kolega, kerabat, dan sahabat dari tanah air, Malaysia, dan Brunei
- ✓ Ketua Badan Pembina Yayasan Unisba dan jajarannya
- ✓ Ketua Badan Pengawas Yayasan Unisba dan jajarannya
- ✓ Ketua Badan Pengurus Yayasan Unisba dan jajarannya
- ✓ Ketua dan Anggota Senat Universitas Islam Bandung
- ✓ Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Bandung,
- ✓ Para pimpinan Badan/Lembaga, Fakultas, Program Pascasarjana, Program studi, Bagian dan UPT di Lingkungan Universitas Islam Bandung,
- ✓ Dewan Penyantun Universitas Islam Bandung
- ✓ Civitas Akademika dan Tenaga Kependidikan serta Ikatan Ibu-ibu Keluarga UNISBA
- ✓ Para undangan dan hadirin yang saya muliakan

Kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, nikmat dan karuniaNya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat wal'afiat pada acara Sidang Senat Terbatas Universitas Islam Bandung dalam rangka Milad ke-63 Unisba dan Pengukuhan Guru Besar. Sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan pada junjunan kita Nabi Muhammad SAW. Merupakan kehormatan dan kebahagiaan bagi saya memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pidato pengukuhan jabatan Guru Besar di bidang Ekonomi Pembangunan di hadapan sidang senat yang mulia ini dengan judul:

Inspirasi Nilai-Nilai Islam dalam Pencapaian SDGs

Hadirin yang Mulia,

Kemunculan SDGs (Sustainable Development Goals) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diluncurkan secara formal oleh PBB pada bulan Januari 2016, menawarkan daya tarik bagi negara-negara anggota PBB. Tidak sekedar adanya acuan arah pembangunan jangka panjang yang mencakup 17 tujuan dan 169 target, namun sekaligus sebuah tantangan yang bisa dijadikan akses dan peluang meningkatkan level pembangunan yang berbuah rekognisi dan prestise. Skenario SDGs mencakup 17 tujuan yakni: 1) mengakhiri segala bentuk kemiskinan, 2) menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, 3) menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, 4) menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, 5) mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan, 6) menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, 7) menjamin akses

energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua, 8) meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, 9) membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi, 10) mengurangi kesenjangan intra dan antar negara, 11) menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan, 12) menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, 13) mengambil langkah dan tindakan darurat yang diperlukan untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, 14) melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan, 15) melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, 16) menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan, 17) menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Dari 17 tujuan tersebut diturunkan ke dalam 169 target dan 230 indikator yang harus tercapai pada tahun 2030 (United Nation, 2017). Dalam perjalanannya tujuan dan target yang ambisius ini, mendapat tantangan di tengah pandemi covid-19 dan pasca pandemi. Ketika orientasi pembangunan seketika harus bergeser pada penanganan covid, penguatan sistem kesehatan dan pemulihan ekonomi, bagaimanakah sketsa upaya ke depannya untuk mencapai SDGs khususnya di Indonesia?

Semangat SDGs adalah upaya integrasi dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup sebagai perwujudan atau operasionalisasi dari konsep Pembangunan Berkelanjutan (PB). Istilah pembangunan berkelanjutan dicetuskan pertamakali oleh divisi khusus PBB untuk lingkungan dan pembangunan ekonomi, yaitu World Commission on Environment and Development (WCED) pada tahun 1987 yang dituangkan dalam laporan Brundtland. Laporan ini dibuat untuk menjawab bahwa isu lingkungan yang terjadi pada tahun 1980-an merupakan dampak dari pembangunan ekonomi sehingga pembangunan ekonomi yang ada perlu memasukkan aspek lingkungan. Dengan dirilisnya laporan ini, muncul semangat dan kesadaran baru tentang lingkungan.

Masa Depan Kita Bersama adalah salah satu referensi paling otoritatif untuk Pembangunan Berkelanjutan. Karya ini mendefinisikan Pembangunan Berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (WCED, 1987). Definisi ini diikuti oleh prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang diuraikan di bawah ini:

- A. Penggabungan Pertumbuhan Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan
- B. Peningkatan Kualitas Hidup Manusia
- C. Terwujudnya Keadilan Sosial
- D. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Keseimbangan Ekologis

e. Optimalisasi Sumber Daya Alam

F. Tanggung Jawab Masyarakat dan Individu

Dalam perjalanannya, prinsip-prinsip yang lebih bervariasi telah berkembang, termasuk pendekatan terpadu atau lintas sektoral antara ekonomi, sosial dan lingkungan (Blowers, 1993; Lusser, 1993). Bahkan Briassoulis (1999) lebih mengedepankan prinsip-prinsip operasional, yaitu prinsip-prinsip tertentu pembangunan berkelanjutan, yang paling menonjol antara lain: (1) keterpaduan; (2) antisipasi dan pencegahan (3) akomodasi yang seimbang dari nilai-nilai yang berbeda dan kepentingan yang bersaing; (4) adaptasi dan pemeliharaan keanekaragaman ekologi dan budaya di wilayah studi; (5) pengakuan terhadap kendala ekologis; (6) interaksi, partisipasi, kerjasama dalam organisasi; (7) terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat; (8) kemandirian dan pemberdayaan lokal; (9) perubahan kelembagaan; desain institusi untuk pembangunan berkelanjutan. Kemudian Berke Philip R. & Maria Manta Conroy (2000) mengupas bahwa ada enam prinsip dasar, yaitu Harmoni dengan alam, Lingkungan binaan yang layak huni, Ekonomi berbasis tempat, Pemerataan, Pembayaran pencemar, Regionalisme yang bertanggung jawab.

Dari definisi di atas, tampak bahwa pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan dimensi waktu, yaitu masa depan. Prinsip-prinsip yang mengikuti pembangunan berkelanjutan mempromosikan dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial. Hubungan antara ketiga dimensi muncul dalam dua pola yang berbeda. Pola pertama, seperti pandangan Daly dalam Sanberg, saling ketergantungan antara lingkungan alam, masyarakat, dan ekonomi bahwa sistem ekonomi tertanam dalam sistem sosial, yang pada gilirannya tertanam dalam sistem lingkungan (Sanberg 2019). Ketika diterjemahkan ke dalam pemikiran input output lingkungan, diperoleh konsep integrasi sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1 di bawah ini.

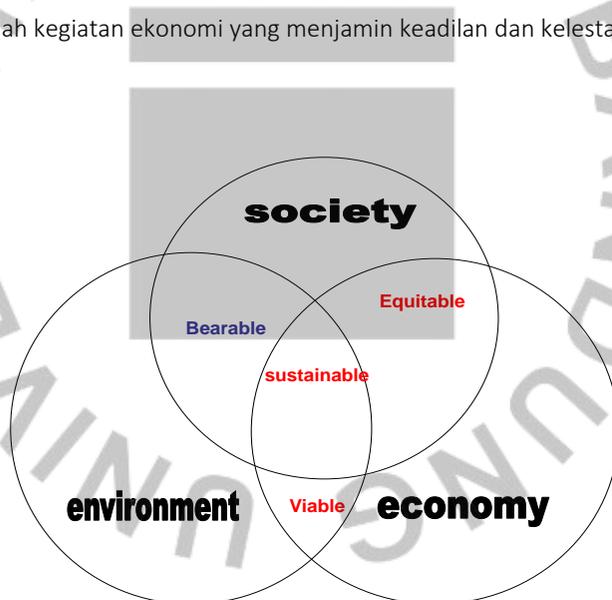


Gambar 1. Integrasi Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Hidup

Manusia di setiap generasi menjalankan kegiatan ekonomi yakni produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi semua kebutuhan mereka. Total produksi, barang dan jasa ditunjukkan oleh Produk Domestik Bruto (PDB). Sebagai output, PDB memanfaatkan input dari

lingkungan seperti tanah, udara, air, energi dan banyak sumber daya alam sebagai bahan baku. Selain output untuk dikonsumsi muncul produk samping berupa limbah yang akan kembali ke lingkungan. Satu hal penting yang perlu diperhatikan ketika total PDB didistribusikan diantara penduduk. Jika pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi tidak merata, maka masalah ketimpangan pendapatan akan muncul. Berdasarkan permasalahan tersebut, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan merupakan konsep yang berupaya menemukan keseimbangan antara masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan dan merupakan persyaratan penting untuk menjamin kualitas hidup yang baik bagi generasi mendatang.

Pola kedua bersumber dari sketsa hubungan tiga pilar (International Union for Conservation of Nature, IUCN). Seperti yang ditunjukkan dalam model pada Gambar 2, titik temu antara perlindungan sosial, ekonomi dan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan. Irisan antara sosial dan lingkungan adalah *bearable*, artinya sarana untuk melindungi lingkungan harus dapat ditanggung oleh masyarakat. Dan irisan antara lingkungan dan ekonomi adalah layak, irisan antara sosial dan ekonomi bersifat berkeadilan. Jadi pola pertama menekankan pada keterpaduan, sedangkan pola kedua pada perpotongan yang dapat disederhanakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah kegiatan ekonomi yang menjamin keadilan dan kelestarian lingkungan.



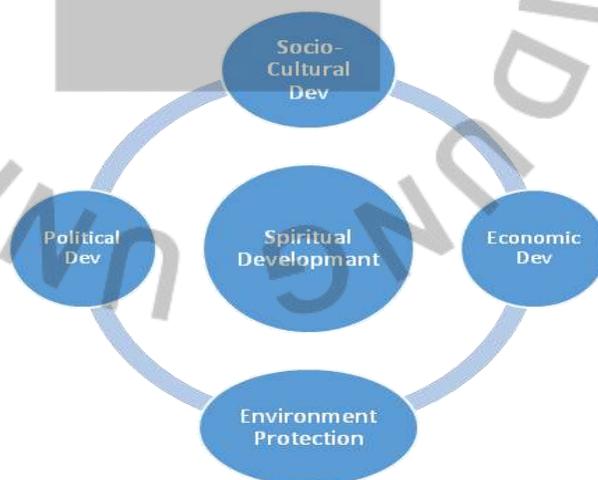
Gambar 2. Skema Pembangunan Berkelanjutan (IUCN, 2006)

Namun dalam praktiknya mewujudkan keterpaduan atau integrasi tidak mudah. Sejumlah analisis muncul, mengungkap penyebab utama penghambat terwujudnya pembangunan berkelanjutan, seperti kemiskinan, ketimpangan, dan kerusakan lingkungan yang semakin parah. Dalam perspektif sekuler, kerusakan lingkungan disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi, sehingga memunculkan beberapa jenis kerusakan lingkungan akibat gaya hidup/budaya konsumtif, distorsi pasar, dan peran lobi (Akhtar, 1996). Gaya hidup konsumtif mendorong meningkatnya permintaan akan sumber daya alam. Gaya hidup berhubungan dengan perilaku, kesalahan fundamental-filosofis

manusia dalam memahami atau memandang diri sendiri, alam, dan habitatnya di seluruh ekosistem yang berdampak pada perilakunya (Abdurrahman, 2012). Implikasinya memodifikasi sikap manusia terhadap pembangunan berkelanjutan akan membutuhkan pendidikan, peningkatan kesadaran publik dan strategi pengembangan kelembagaan (Holden, Meg 2008).

Berangkat dari pemikiran tersebut, secara filosofis keberlanjutan membutuhkan perubahan mendasar dalam ideologi, transformasi budaya, sikap dan perilaku, perubahan paradigma, reformasi kelembagaan yang didukung oleh struktur politik dan kelembagaan (Hajer dalam Roberts dan Chan, 1997; Redclift dalam Briassoulis, 2001; Counsell, 1999; Holden, 2008; Hafsa dan Astrom, 2011; PBB, 2015). Spektrum inilah yang mendorong munculnya pandangan pembangunan berkelanjutan dalam konteks nilai-nilai budaya, agama dan modal spiritual (Zohar dan Marshall, 2004; Marsuki, 2009; Becceheheti dan Borzaga, 2010, Narayanan, 2013). Mereka percaya bahwa nilai-nilai ini diperlukan untuk masyarakat yang berkelanjutan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, karena berdasarkan nilai-nilai tersebut memiliki potensi untuk aktivisme ekologi, sosial dan politik atau praktik individu dan masyarakat dan kapasitasnya untuk memungkinkan pengembangan diri.

Abdulrachman (2011) mengajukan model pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari lima indikator pembangunan berkelanjutan, yaitu: (1) pembangunan sosial budaya, (2) pembangunan ekonomi, (3) pembangunan politik, (4) perlindungan lingkungan, dan (5) perkembangan spiritual yang diilustrasikan pada Gambar. 3.

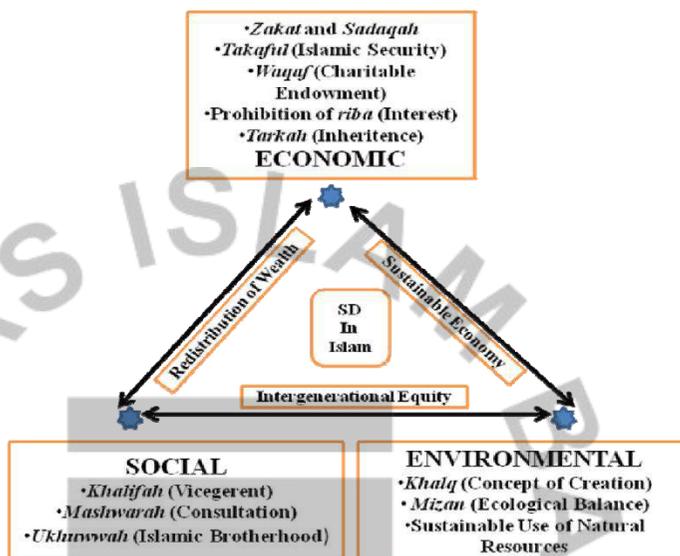


Gambar. 3. Model Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Islam (Abdulrachman, 2011)

Menariknya, dimensi sosial dalam model ini digandengkan dengan sisi budaya yang mempertimbangkan adat dan kebiasaan masyarakat. Kemudian muncul dimensi politik terkait dengan berbagai regulasi, kebijakan dan komitmen politik serta anggaran pemerintah. Lebih

menariknya lagi, pembangunan spiritual menjadi inti bagi pembangunan lainnya. Namun tidak terungkap bagaimana mekanisme spiritual yang dimaksud?

Abdul Hasib Ansari et. Al. (2012) telah mengelaborasi nilai-nilai Islam dengan menampilkan fitur-fitur penting dari pembangunan berkelanjutan yang secara implisit menggambarkan kekuatan spiritual. Gambar 4 memberikan cuplikan tampilan fitur penting dari pembangunan berkelanjutan dalam Islam.

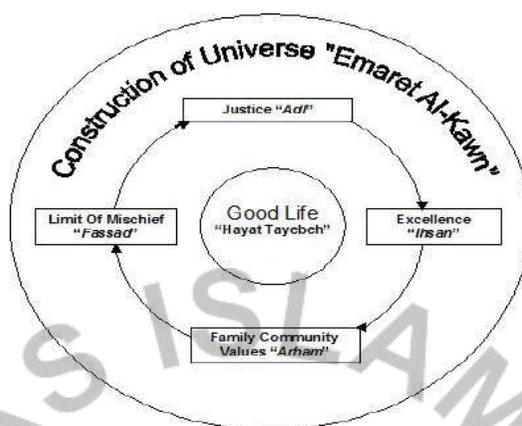


Gambar. 4. Fitur-fitur Penting Pembangunan Berkelanjutan dalam Islam (Ansari et. Al, 2012)

Ansari memunculkan sarana yang dapat menjamin keadilan ekonomi dari sisi non-mekanisme pasar, yakni berbagai jenis dana sosial yang disediakan oleh kelompok masyarakat yang mampu secara ekonomi bagi masyarakat yang tidak mampu. Kesiediaan berbagi adalah salah satu ekspresi dari spiritualitas (*standing moral*) golongan kaya dan transaksi ini secara langsung menunjukkan kekuatan modal sosial. Sisi mekanisme pasar dalam model ini terungkap melalui larangan riba. Sebenarnya pola kerjasama usaha (*syrkah*) dengan skema bagi hasil dapat ditampilkan pula sebagai sarana untuk keadilan ekonomi. Sekali lagi dalam hal ini pun titik krusialnya adalah kesediaan berbagi yang tidak akan lepas dari spiritualitas (*standing moral*) dari pemilik modal. Aspek spiritual secara eksplisit muncul dalam model Ansari ini melekat pada dimensi lingkungan hidup yakni keyakinan pada Allah SWT sebagai pencipta langit dan bumi dalam keadaan seimbang sehingga harus menjaga kelestariannya.

Pemikiran lain yang secara substansi mendekati namun tampil agak berbeda muncul dari Odeh Rashed Al-Jayyousi (2012) yang tidak menyebutkan dimensi keberlanjutan secara eksplisit, namun lebih pada sifat yang harus terpenuhi yaitu keadilan (*adl*), kebaikan (*ihsan*), kasih sayang/modal sosial (*arham*) dan pembatasan kerusakan/keburukan (*fasad*), sebagaimana

diilustrasikan pada Gambar 5. Kelebihan model Al-Jayyousi (2012), memunculkan ihsan yang merujuk pada sosok manusia unggul yang cenderung berbuat baik (taqwa) berdasarkan keimanannya. Kehidupan yang baik akan tercapai jika keempat sifat yang saling menentukan ini terpenuhi.



Gambar 5. Model Pembangunan Berkelanjutan dalam Pandangan Islam (Al-Jayyousi, 2012)

Keselarasan pemikiran keduanya mengkomodir non-mekanisme pasar untuk mencapai keadilan ekonomi dan mengendalikan diri dalam eksploitasi SDA yang menimbulkan kerusakan. Meskipun Al-Jayyousi (2012) tidak memunculkan secara eksplisit ketiga dimensi, namun spirit keberlanjutan tetap terasa dibalik sifat-sifat yang ditampilkannya. Dengan demikian pada prinsipnya semua cendekiawan Muslim sepakat bahwa berkelanjutan Pembangunan melibatkan tiga dimensi yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan, melalui ekspresi dua pola. Pertama, injeksi spiritual sebagai dasar untuk pembangunan berkelanjutan. Kedua, inspirasi nilai-nilai Islam untuk setiap dimensi pembangunan berkelanjutan.

Seluruh pemikiran filosofis di atas untuk mewujudkan integrasi sudah memadai. Hanya saja ketika nilai-nilai ini ditransfer ke dalam aktivitas nyata, seperti apa bentuk integrasi tersebut dalam praktiknya? Secara pragmatis, upaya integrasi ketiga dimensi membutuhkan konsep dasar seperti berfikir sistem dengan alat bantu model kualitatif dan kuantitatif diantaranya model Input Output (PBB, 2015). Dalam kerangka SDGs, integrasi nampak dari ketergantungan antar target (Weitz et al, 2014), dan target mana yang memiliki daya ungkit, Blanc (2015) menunjukkan bahwa dua dari tujuan yang diusulkan, SDG 12 tentang konsumsi dan produksi berkelanjutan (SCP) dan SDG 10 tentang ketidaksetaraan, menyediakan koneksi penting di antara tujuan lainnya.

Berbicara upaya mencapai SDGs, melalui konsep berfikir dan pendekatan serta metode yang digunakan adalah bagian dari proses perencanaan. Agenda SDGs sebagai agenda pembangunan yang bersifat top-down dari PBB sudah menginspirasi para perencana. Pengalaman Indonesia, Malaysia dan Brunei dalam mengadopsi SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional nya menunjukkan proses yang sama namun hasil yang berbeda (Dariah, 2020). Sebagai *top down planning* dari PBB, pada tahun 2018 masing-masing negara sudah melakukan penyesuaian tujuan, target dan indikator SDGs dengan RPJMN masing-masing. Dalam implementasi SDGs, Indonesia lebih di depan, sangat responsif, dan lebih terstruktur. Komitmen tinggi ditandai dengan keluarnya Perpres yang melahirkan Rencana Aksi Nasional dan Subnasional Tahun 2017-2019 serta roadmap Tahun 2017 - 2030. Lingkup pembangunan lebih luas dengan menambah indikator hingga 319, lebih banyak dibandingkan indikator global 230, mencerminkan sebagai *lower middle income country* yang ingin meningkatkan level pembangunannya. Sementara Malaysia fokus pada pemetaan SDGs dengan Rancangan Malaysia ke-11 termasuk indikator yang sudah tersedia dan yang akan dikembangkan. Mereka melakukan prioritas pada tujuan tertentu. Demikian halnya Brunei pada tahun 2018 masih pada tahap identifikasi jumlah indikator yang akan diterapkan di Brunei. Namun kedua negara ini sangat menonjolkan prinsip-prinsip Islam, mereka menolak kebebasan hak asasi manusia seperti LGBT (hasil interview dengan para perencana di kedua negara).

Namun disayangkan, di ketiga negara belum nampak strategi yang menunjukkan upaya integrasi ketiga dimensi. Strategi bersifat parsial sesuai tujuan dan target masing masing tujuan pada akhir perencanaan sebagaimana amanat PBB, dengan pendekatan *backcasting*, yakni kerangka pemecahan masalah yang menguraikan bagaimana pembangunan dengan tindakan menengah berdasarkan target kuantitatif jangka panjang. Backcasting bukanlah peramalan yang memperkirakan probabilitas berbagai hasil berdasarkan tren yang diharapkan (SDG Guide, 2018). Backcasting dimulai dengan proyeksi hasil yang diinginkan dan bekerja mundur untuk memahami apa yang dibutuhkan untuk capaian di masing-masing negara.

Para hadirin yang dimuliakan Allah Swt,

Adopsi pendekatan perencanaan top-down dengan mengakomodir unsur lokal sudah merupakan fenomena biasa. Definisi perencanaan, implementasi dan monitoring dirancang oleh institusi di atasnya yang memiliki otoritas bukan oleh masyarakat lokalnya (SDG Knowledge Hub 2019). Pandangan bahwa keberhasilan perencanaan tergantung pada kekuatan partisipasi lokal (Bartlett and Baber, 2005; Martin and Rice, 2014) karena partisipasi local membuat arah rencana menjadi jelas (Kantemeridou et al. 2013), perlu dipertegas bagaimana wujud idealnya?

Partisipasi dalam proses perencanaan dianggap sebagai bagian penting dari perubahan paradigma menuju perencanaan pembangunan berkelanjutan (Berry et al, 1993) dalam Conroy and Berke, 2004). Beberapa penelitian berpendapat bahwa keberhasilan inisiatif perencanaan pembangunan berkelanjutan bergantung pada tingkat partisipasi yang kuat (Bartlett dan Baber, 2005; Koontz, 2006 dalam Martin dan Rice, 2014). Model keberlanjutan perencanaan mencakup pendekatan bottom-up untuk pemecahan masalah, memberdayakan orang untuk bekerja sama, memulai tindakan, bereksperimen, dan mempelajari fakta (Shutkin, 2000 dalam Conroy dan Berke, 2004). Melalui perencanaan partisipatif diharapkan terdapat komitmen yang kuat. Kantemeridou

et al (2013) menyatakan bahwa dengan keterlibatan partisipasi maka arah strategis yang dibuat dapat mengakomodir kepentingan semua pihak yang tentunya akan mendorong pembangunan dengan arah yang jelas. Selain menuntut partisipasi, Yusoff et al. (2014) menyatakan bahwa perencanaan juga perlu fleksibel, lebih akomodatif dan sederhana. Menurut Cowell (2013), fleksibilitas dan pemahaman lebih dalam perencanaan di sini adalah keberanian para perencana untuk mengubah stereotip *regional branding* untuk disesuaikan dengan perubahan kebutuhan pembangunan yang sedang terjadi dengan cara reorganisasi perencanaan (perubahan strategi dan tujuan pembangunan). Perencanaan tersebut kemudian dapat menghasilkan pengelolaan sumber daya yang baik. Melalui manajemen yang baik, tujuan pembangunan dapat tercapai (Hayter dan Nieweler, 2018). Upaya partisipasi lokal yang berhasil harus memiliki keluasan dan kedalaman yang memadai (Berry et al, 1993 dalam Conroy dan Berke, 2004).

Munculnya pemikiran perencanaan pembangunan berkelanjutan dalam konsep ekoregion, mengarah pada pemanfaatan SDA lokal (pertanian) secara organik sehingga kelestarian lingkungan dapat terjaga (Assiri et al, 2021). Pemikiran Assiri ini sangat selaras dengan hasil penelitian kami, bahkan menemukan hal penting lainnya.

Contoh *best practice* implementasi pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal mulai dari perencanaan sampai monitoring ditemukan di Desa Cibeureum Wetan, Jawa Barat, Indonesia dan Kampung Lintang, Sik, Kedah, Malaysia. Keduanya telah menjalankan budidaya tanaman pangan organik bahkan Kelompok Tani bernama Simpay Tampomas di Desa Cibeureum Wetan menjalankan system pertanian terintegrasi di atas lahan kritis bekas penambangan pasir di kaki Gn. Tampomas. Mereka sudah mengusahakan penanaman varietas buah naga merah organik. Selain memiliki kemampuan hidup yang baik pada lahan bekas pertambangan pasir, juga bernilai tinggi karena berorientasi ekspor. Ketersediaan pupuk organik terjamin dengan adanya ternak kambing peliharaan, dan pakan ternak berupa indigofera menjadi tumpeng sari tanaman buah naga merah organik. Ternak kambing yang dikembangkan adalah kambing Etawa yang menghasilkan susu dengan kualitas yang tinggi. Pengelolaan usaha dilakukan secara bersama sama, diwadahi dalam kelompok tani.

Sementara SRI Lovely (Sistem Intensifikasi Padi, Lembah Organik Lintang) merupakan areal tanam padi organik di Kampung Lintang, Sik, Kedah, Malaysia. Dibalik akronim formal tersebut terdapat filosofi nilai yang luar biasa, yaitu SRI yang merupakan singkatan dari Sabar (sabar), Ridho (ridha dengan kehendak Tuhan), dan Istiqomah (ketabahan). Sabar dan ikhlas menjadi hamba Allah SWT, sedangkan istiqomah adalah konsisten dalam budidaya untuk kelestarian. Koperasi Agro Belantik bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi pengelolaan sumber daya alam dalam budidaya padi. Misi organisasi adalah menjadi perusahaan terbaik di Malaysia di sektor pertanian. Visinya adalah menggunakan teknologi tinggi di sektor pertanian, menyediakan produk beras dalam pilihan tinggi dan memberikan layanan pelanggan terbaik bagi pelanggan dan pemasok.

Petani di SRI melakukan penanaman padi berdasarkan Al-Qur'an. Mereka percaya serangga tidak akan membahayakan pertanian padi mereka bahkan jika mereka tidak menggunakan insektisida. Bumi dibuahi oleh air hujan. Serangga adalah makhluk Allah yang selalu berdzikir/zikir (mengingat Allah). Lebih baik meninggalkan serangga dan membiarkan nasi diberkati karena dzikir mereka. Jika serangga-serangga itu dibasmi, maka tidak akan ada lagi makhluk yang menjalankan dzikir nasi dan tidak lagi diberkati. Serangga sebagai predator dan parasit berperan dalam penyeimbang alam.

Anggota Koperasi Belantik Sik Bhd Agro melibatkan masyarakat local dengan fokus kegiatan peningkatan kesejahteraan karena sebagian besar anggotanya adalah petani miskin. Koperasi menyediakan sumber pangan, kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan anggota. Istri anggota koperasi yang tidak bekerja diberikan kesempatan menanam sayuran organik. Semua kebutuhan untuk bertani disediakan oleh koperasi dan sebagian hasil panen sayuran diberikan kepada anggota keluarga secara cuma-cuma. Upaya ini diharapkan dapat meringankan beban kehidupan keluarga anggota dan yang terpenting anggota keluarga dapat menikmati makanan yang bersih, sehat dan halal. Dengan demikian, makanan yang diperoleh berasal dari sumber yang "Halalan Thoyyiban".

Berdasarkan dua kasus di atas, praktik pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan adalah nyata. Menggunakan istilah konsep Ecoregion dari Hayter dan Nieweler (2018), Desa Cibeureum Wetan sudah cukup lama menerapkan pemanfaatan sumber daya alam lokal secara organik, mulai dari persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pengembangan melalui kegiatan tanaman lainnya, dan peternakan. Langkah awal yang bisa disebut penetapan rencana, dibangun di atas niat, tekad, dan komitmen yang kuat dari penggagas tokoh masyarakat terhadap lahan yang tidak produktif, bahkan kritis di Desa Cibeureum-wetan. Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan diwujudkan melalui budidaya pertanian yang ramah lingkungan. Melalui pembentukan kelompok tani di Desa Cibeureum Wetan dan koperasi di Kedah, pengelolaan kegiatan ekonomi dilakukan secara bersama-sama. Anggota masyarakat memiliki akses terhadap kegiatan ekonomi, peningkatan pengetahuan, kesempatan kerja, dan pembiayaan yang pada gilirannya memiliki akses terhadap peningkatan pendapatan.

Kegiatan budidaya organik yang konsisten menghasilkan komoditas pertanian yang memiliki harga jual tinggi. Harga buah naga organik Rp 20.000/kg, dibandingkan non-organik yang hanya Rp 2.500-6.000/kg. Harga eceran susu kambing etawah adalah Rp. 45.000/liter dan pembelian dalam jumlah besar Rp. 35.000/liter; sedangkan harga susu sapi berkisar Rp 10.000 – 12.000/liter. Begitu pula dengan harga beras organik yang mencapai RM 15 sekilo, dibandingkan dengan harga beras biasa yang hanya berkisar RM 5. Kegiatan ekonomi berkelanjutan di kedua lokasi tersebut berdampak pada perkembangan ekonomi lokal. Dengan demikian, pandangan Hayter dan Nieweler (2018) yang menyatakan bahwa hubungan antara perencanaan dan pembangunan ekonomi memiliki hubungan searah, terbukti di kedua kasus ini.

Kepentingan kelompok dikedepankan karena adanya dua inisiator yang gigih dan bijaksana sebagai pemimpin. Partisipasi masyarakat sebagai anggota kelompok sangat terbuka dan terbentuk karena mereka meneladani pemimpinnya sebagai panutan dan dorongan untuk menikmati manfaat budidaya organik sekaligus melestarikan lingkungan. Artinya, kehadiran pemimpin yang adil, inovatif, berkomitmen dan memiliki semangat juang tinggi untuk pembangunan berkelanjutan telah menarik partisipasi masyarakat. Apalagi niat dan komitmen pemimpin yang dilandasi nilai-nilai agama dapat mempengaruhi bentuk partisipasi yang tidak hanya hadir dalam konteks keterlibatan fisik semata tetapi ditempatkan dalam kerangka ibadah kepada Allah SWT.

Dalam dua kasus inisiatif pembangunan berkelanjutan lokal akar rumput tersebut, ditemukan lima prinsip yang dijalankan diantara mereka. Lima prinsip itu adalah niat, khalifah, kepemimpinan, keadilan, dan musyawarah mufakat. Prinsip pertama adalah niat. Dalam ajaran Islam, perbuatan tergantung niat. Dalam rangka perumusan rencana pembangunan yaitu melihat ke depan terhadap tujuan dan sasaran pembangunan, tentu sangat tepat untuk menetapkan niat sebagai dasar dalam merumuskan rencana pembangunan. Niat dalam menyusun rencana pembangunan menurut ajaran Islam adalah rangkaian ibadah untuk mencari keridhaan Allah SWT, berperan sebagai hamba Allah SWT dalam memakmurkan bumi dan menyebarkan kebaikan/manfaat.

Ketika niat telah diungkapkan, seyogianya diikuti dengan *Kaifiat*, yaitu tata cara atau proses Islam dengan tolok ukur syariat. Perencanaan mencakup substansi dan proses. Perencanaan adalah upaya mengarahkan pembangunan sedemikian rupa sehingga tercapainya *mashlahah* (kepentingan umum yang terbaik) bagi semua orang dan *falah* (kebahagiaan di dunia dan akhirat). Untuk mencapai *falah*, Islam secara bersamaan mengajarkan konsepsi spiritual (*aqidah ruhiyah*) dan konsepsi politik (*aqidah siyasiyah*), bahwa ajaran Islam berkaitan dengan urusan spiritual dan politik (Abdurrahman, 2012). Konsepsi spiritual mencakup aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, yaitu hukum ibadah; dan hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, yaitu hukum akhlak (*akhlak*), hukum yang mengatur pakaian, dan hukum yang mengatur makanan dan minuman. Sedangkan konsepsi politik meliputi sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem pendidikan, sistem hukuman atau peradilan, dan politik luar negeri.

Prinsip Kedua: khalifah mencerminkan aspek manajerial manusia dan cara menjalankan fungsi manajemen secara umum. Artinya, manusia harus menjalankan fungsi khalifah dalam arti mengelola dunia dan bumi dengan baik, tidak merusaknya, dan tidak melakukan pertumpahan darah. Fungsi khalifah dalam konteks ini adalah bagaimana manusia melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan berkeadilan dimana saja dan kapan saja.

Prinsip ketiga adalah kepemimpinan. Konsep kepemimpinan dalam Al-Qur'an diungkapkan dalam beberapa istilah: Khalifah, Imam, Ulil Amri. Imam dikaitkan dengan manusia secara sosial, pemimpin umat. Imam seorang pemimpin dengan intelektualitas dalam konteks organisasi (lembaga) yang mengelola kepentingan publik. Keterkaitan antara Ulil amri dan kerasulan

menunjukkan pentingnya ketaatan masyarakat kepada ulil amri dalam mengelola urusan publik. Jadi, pemimpin harus adil terhadap rakyatnya dan rakyat harus patuh pada pemimpinnya. Dari perspektif Islam, ada kepemimpinan Islam yang menggunakan pendekatan sifat, bagaimana pemimpin mempengaruhi pengikutnya dengan panutan. Nabi dan Rasul dalam Al-Qur'an adalah panutan bagi pemimpin dan kepemimpinan. Sifat kenabian: 1. Siddiq (Integritas); 2. Amanah (Terpercaya); 3. Fathonah (Kecerdasan); dan 4. Tabligh (Komunikatif).

Prinsip Keempat adalah Keadilan. Keadilan mengacu pada keadilan di antara manusia dan adil terhadap alam. Jika kita melihat alam semesta yang diciptakan oleh Allah SWT dengan segala isinya, semuanya seimbang dan harmonis. Keseimbangan (balance) yang berkaitan dengan konsep 'adl (keadilan) adalah suasana keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan manusia yang membentuk tatanan sosial yang harmonis.

Prinsip Kelima adalah Musyawarah Mufakat (musyawarah untuk mufakat). Karena kegiatan usaha dikelola secara berkelompok, musyawarah untuk mufakat sudah menjadi tradisi. Dilihat dari visi dan misi kedua kelompok studi tersebut, terlihat bahwa kepentingan bersama menjadi prioritas utama.

Para hadirin yang dimuliakan Allah Swt,

Nilai-nilai Islam yang melekat dalam mengelola pertanian organik dapat menjadi inspirasi dalam menghadapi tantangan pemulihan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, ketimpangan pendapatan pasca pandemi covid-19. Dampak covid-19, ekonomi nasional berkontraksi -2,07% pada tahun 2020 dibanding tahun 2019 yang tumbuh positif 5,02%. Hal serupa dialami oleh seluruh provinsi kecuali Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua (BPS, 2021). Kontraksi diikuti peningkatan pengangguran dari 5,23% pada tahun 2019 menjadi 7,07% pada tahun 2020. Seluruh provinsi mengalami hal yang sama termasuk ketiga provinsi yang pertumbuhan ekonominya positif. Tingkat kemiskinan mengalami kenaikan menjadi 6,09% pada tahun 2020 dari 5,5% pada tahun 2019. Demikian halnya untuk setiap provinsi. Ketimpangan pendapatan yang tercermin dalam Gini Ratio, meningkat dari 0,380 tahun 2019 menjadi 0,385 tahun 2020, namun terdapat 21 provinsi dimana kondisi ketimpangan membaik yang disebabkan menurunnya pengeluaran 20 persen golongan atas melebihi penurunan pengeluaran kelompok lainnya. Menggembirakan kondisi lingkungan hidup yang terekam dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 70,27 meningkat dari angka 66,55 pada tahun 2019. Meningkatnya IKLH tahun 2020 dikarenakan adanya perbaikan pada Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Air (IKA). Pembatasan mobilitas dalam mencegah penularan covid-19 di satu sisi berdampak pada melemahnya pembangunan ekonomi namun di sisi lain berdampak positif terhadap kualitas lingkungan hidup.

Tantangan pasca covid-19 adalah pemulihan ekonomi, bagaimana ekonomi tumbuh positif bersamaan dengan menurunnya pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, atau

sederhananya tumbuh berkualitas dan berkarakter. Dalam kerangka 17 tujuan SDGs berarti fokus untuk tujuan 8) meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Todaro (2014) memberikan sinyal karakter pertumbuhan ekonomi bersentuhan dengan *bagaimana cara mencapainya, siapa yang berperan serta, sektor mana yang mendapat prioritas, lembaga apa yang menyusun dan mengatur*. Dalam konteks dimensi pembangunan berkelanjutan, pemikiran Todaro lebih kental pada dimensi sosial dan ekonomi, sehingga untuk integrasi ketiga dimensi, karakter pertumbuhan ekonomi harus dilengkapi dengan dimensi lingkungan hidup.

Selama pendekatannya pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu, maka harus teridentifikasi sektor sektor apa yang tumbuh stabil dan cenderung meningkat, memiliki elastisitas kesempatan kerja yang elastis dan berdampak relative rendah terhadap lingkungan hidup.

Hasil penelitian untuk kasus Indonesia dan Brunei Darusalam, dengan alat bantu Multi Factor Evaluation Process, diperoleh hasil bahwa yang memiliki skor tertinggi sebagai sektor yang berpotensi besar untuk berkelanjutan adalah Sektor Informasi and Komunikasi dan Sektor Jasa Perusahaan. Industri yang tergolong ke dalam Sektor Informasi and Komunikasi yaitu Penerbitan, Produksi Gambar Bergerak, Video, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik, Penyiaran dan Pemograman (Radio dan Televisi), Telekomunikasi, Pemograman, Konsultasi Komputer dan Teknologi Informasi. Sementara jasa perusahaan mencakup jasa-jasa professional yang berpraktik menunjang aktivitas ekonomi lainnya.

Sekalipun Sektor Informasi and Komunikasi ada kecenderungan inelastis dalam menyerap tenaga kerja, namun potensi menjadi sumber pertumbuhannya relatif tinggi dan dampak fisik lingkungan yang relatif rendah. Elastisitas kesempatan kerja yang inelastis sangat wajar karena sektor ini bersifat padat modal dan padat pengetahuan, kreatifitas dan inovasi. Lingkup aktivitasnya sebagian besar merupakan bagian dari ekonomi kreatif. Memasuki revolusi industry 4.0, digitalisasi dan penggunaan internet semakin massive, terlebih di tengah pandemic covid-19. Sehingga sangat wajar sektor ini tumbuh tinggi dan dapat menjadi *source of growth* yang bisa diandalkan. Sementara Sektor Jasa Perusahaan yang menunjukkan kegiatan para pekerja professional cenderung elastis dalam menyerap tenaga kerja, dampak fisik lingkungan relative rendah, namun belum menjadi sumber pertumbuhan sebesar Sektor Informasi dan Komunikasi.

Namun kedua sektor ini sifatnya penunjang peningkatan produktivitas yang lebih tinggi di sektor riil. Sektor tradable yang menjadi penggerak utama perekonomian dalam menghasilkan berbagai produk kebutuhan pokok manusia adalah sektor pertanian dan industri pengolahan. Kedua sektor tersebut merupakan sektor dominan dalam perekonomian Indonesia saat ini. Hasil perhitungan menunjukkan kedua sektor ini memiliki skor tertinggi kedua, karena keduanya memiliki kecenderungan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, cenderung elastis dalam menyerap tenaga kerja, hanya saja dampak lingkungan hidup yang ditimbulkannya relative tinggi. Dengan demikian hambatan untuk berkelanjutan kedua sektor ini adalah dimensi lingkungan hidup.

Sementara kasus mikro di kedua desa sebagaimana penjelasan sebelumnya memberikan pembelajaran bahwa yang diutamakan adalah perlindungan lingkungan hidup terlebih dahulu. Kegiatan ekonomi tercipta untuk menjaga kualitas lingkungan hidup. Ketika ekonomi tersebut dikelola bersama-sama secara berkelompok melibatkan masyarakat lokal, telah menjadi proses yang berpeluang merespon masalah kemiskinan dan ketimpangan. Di sinilah integrasi ketiga dimensi muncul dan menghasilkan praktik pertanian berkelanjutan yang mensejahterakan masyarakat lokal. Dengan demikian budidaya organik secara berkelompok dapat menjadi atribut pertanian berkelanjutan.

Tentunya atribut akan berbeda untuk aktivitas industri pengolahan yang mengolah input dengan teknologi tertentu dalam menghasilkan output. Kepedulian akan nampak dari bentuk-bentuk praktik lingkungan mulai dari penggunaan bahan ramah lingkungan, mengutamakan pemasok input yang ramah lingkungan, hingga pengelolaan limbah untuk memenuhi standar kualitas lingkungan. Sejumlah ciri dalam proses produksi diantaranya identifikasi limbah secara sistematis dalam aktivitas bisnis, pengelolaan dan pembersihan limbah termasuk dalam kebijakan aktivitas bisnis, membangun komitmen dalam tindakan penghapusan limbah, karyawan memiliki budaya membersihkan limbah. Lebih dari itu adalah tanggungjawab pasca produksi yakni memperbaiki lingkungan yang rusak oleh proses produksi, menjaga kelestarian lingkungan sekitar agar perusahaan dapat tetap beroperasi.

Untuk kegiatan industri pengolahan, didorong perpaduan penciptaan nilai tambah dan peduli lingkungan melalui eco inovasi secara mandiri dan sesuai dengan problem teknisnya. Hasil penelitian terhadap pengusaha di Indonesia dan Brunei, ternyata variabel kepedulian dalam praktik lingkungan tersebut lebih kuat pengaruhnya terhadap keberlanjutan dibandingkan dengan inovasi. Sangat logis dimana inovasi muncul karena pelaku usaha memiliki pertimbangan terhadap masalah lingkungan dan komitmen mencapai keberlanjutan. Sederhananya tidak mungkin melakukan inovasi tanpa ada kepedulian. Jadi kepedulian menjadi hal utama penentu keberlanjutan.

Hanya saja, untuk menjamin integrasi ketiga dimensi, aktivitas produksi yang peduli lingkungan ini perlu dilengkapi dengan pengelolaan bisnis yang menjamin keadilan untuk mengurangi ketimpangan. Inspirasi nilai Islam kami peroleh dari pola kerjasama usaha mudharabah. Melalui utilisasi konsep distribusi pendapatan fungsional yakni distribusi total pendapatan nasional berdasarkan penerimaan masing-masing faktor produksi (tanah, tenaga kerja, modal, kewirausahaan), distribusi balas jasa berupa gaji atau upah, sewa tanah dan profit merupakan mekanisme pasar yang belum disentuh oleh pemikir Islam sebelumnya.

Bagi hasil untuk tenaga kerja bersifat tambahan, karena sebelumnya tingkat upah ditentukan secara eksogen melalui akad *musyatarak*. Bagi hasil memberikan tambahan nilai bagi tenaga kerja berupa tambahan pendapatan terhadap upah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pendekatan matematis dalam proses maksimisasi keuntungan dengan internalisasi tingkat bagi hasil tersebut, telah menghasilkan 7 rumusan proposisi yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori. Pertama, terkait

Standing moral pemilik modal didapati 2 proposisi yakni proposisi 1 bahwa penilaian yang terlalu besar dari shahibul maal terhadap nilai kapitalnya, akan memperendah pendapatan tenaga kerja. Proposisi 6 bahwa membesarkan share bagi hasil untuk mudharib dari shahibul maal, maka akan meningkatkan pendapatan tenaga kerja. Kedua, kategori subyektivitas kesediaan berbagi menampilkan 2 proposisi. Proposisi 3 bahwa pendapatan yang diterima tenaga kerja tidak akan lepas dari unsur subyektif (moral mudharib dan shahibul maal). Proposisi 7 bahwa akad bagi hasil antara mudharib dengan shahibul maal, sangat menentukan pendapatan tenaga kerja. Kategori terakhir adalah Produktivitas tenaga kerja, menyajikan 3 proposisi. Proposisi 2 bahwa nilai sumber daya waktu harus divalusi secara wajar oleh tenaga kerja, karena apabila terlalu besar akan mengurangi pendapatannya pada perusahaan yang dipimpin mudharib. Proposisi 4 bahwa tingkat upah yang ditentukan bersama melalui akad musyatarak mencerminkan nilai produktivitas netto tenaga kerja yang dibobot oleh share bagi hasil mudharib. Proposisi 5 bahwa semakin tinggi produktivitas fisik marginal tenaga kerja, maka akan meningkatkan tingkat upah. Seluruh rumusan proposisi tersebut intinya menunjukkan bahwa distribusi pendapatan yang adil diantara ketiga pihak tersebut ditentukan oleh share bagi hasil, *standing* moral kesediaan berbagi, dan produktivitas tenaga kerja.

Berdasarkan seluruh rangkaian di atas, sebagai penutup ijinkan saya menegaskan inspirasi nilai-nilai Islam dalam mengisi pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan adalah berikut ini:

1. Dalam mengelola sektor ekonomi yang rawan dengan lingkungan hidup, harus diawali dengan niat dan komitmen peduli lingkungan hidup. Ketika perlindungan lingkungan hidup dikedepankan, terciptalah kegiatan ekonomi yang bernilai tambah tinggi untuk menjaga kualitas lingkungan hidup. Disaat ekonomi tersebut dikelola bersama-sama secara berkelompok melibatkan masyarakat lokal, telah menjadi proses yang berpeluang merespon masalah pengangguran dan kemiskinan, serta membudayakan musyawarah mufakat.
2. Untuk kegiatan industri pengolahan, didorong perpaduan penciptaan nilai tambah dan peduli lingkungan melalui eco inovasi secara mandiri dan sesuai dengan problem teknisnya.
3. Distribusi pendapatan yang adil diantara pemilik modal, pengelola dan pekerja ditentukan oleh proporsi bagi hasil, *standing* moral pemilik modal dalam hal kesediaan berbagi, dan produktivitas tenaga kerja.
4. Pengelolaan pembangunan berkelanjutan bertumpu manusia yang seyogyanya cenderung berperilaku baik (ihsan) dengan segala kesadaran dan keimanannya sebagai hamba Allah dalam menjalankan segala perintahNya untuk mencapai ridho Allah Swt, baik dalam menjaga lingkungan hidup maupun kesediaan berbagi asset baik melalui instrument mekanisme pasar maupun non-mekanisme pasar.

5. Untuk menjamin keberlanjutan pun perlu secara kontinyu meningkatkan investasi modal manusia menuju tenaga kerja yang berakhlak mulia, kompeten, produktif dan memiliki kemampuan berinovasi.
6. Perpaduan untuk mengkondisikan ihsan dan produktif tentunya perlu pelembagaan dibawah kepemimpinan yang memiliki sifat kenabian: 1. Siddiq (Integritas); 2. Amanah (Terpercaya); 3. Fathonah (Kecerdasan); dan 4. Tabligh (Komunikatif).

Hadirin yang saya muliakan,

Sebelum mengakhiri pidato pengukuhan ini, perkenankanlah saya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas bantuan dan ridhoNya saya dapat dikukuhkan dalam jabatan Guru Besar. Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian, bantuan dan kerjasama, serta doa-doa yang tulus ikhlas. Secara khusus, terima kasih saya sampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atas kepercayaan yang diberikan kepada saya dalam mengemban jabatan Guru Besar dalam bidang Ekonomi Pembangunan.

Selanjutnya ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Rektor Universitas Islam Bandung, Prof. Dr.H. Edi Setiadi, S.H,M.H., Prof. Dr. dr. M. Thaufiq Boesoerie. MS., Sp.THT- KL(K) sebagai Rektor ke-9 dan 10 atas dorongan dan fasilitasnya, Badan Pengurus Yayasan Universitas Islam Bandung yang senantiasa memotivasi, para kolega Dosen di Lingkungan FEB, khususnya Prodi Ekonomi Pembangunan terutama Pa Yuhka dan Bu Ade yang sudah setia menjadi mitra dalam karya ilmiah saya. Kepada Prof Rina Indiasuti (Rektor Unpad), Prof Armida Salsiah Alisjahbana, Prof. Bonar Sinaga, Prof. Bunasor Sanim, Prof. Hermanto dan Prof. Paruliah Hutagaol sebagai guru-guru teladan yang telah membimbing saya selama kuliah di Unpad dan IPB, juga untuk para guru semasa sekolah di SDN Cibeureumwetan, SMPN Legok dan SMAN I Sumedang.

Kepada Prof Toto Tohir, Prof Muhardi dan Prof Arief Yusuf Anshory yang sudah memberikan penilaian terhadap karya ilmiah saya. Kepada Prof Abdul Ghafar Ismail yang telah memberi kesempatan riset bersama IDB (Islamic Development Bank), Prof Muhammad Syukri Salleh (USM) atas kolaborasi yang sangat indah dalam riset, Yang Mulia Dr Norarfan sebagai Rektor Unissa Brunei yang sudah mensupport para penyelidik menjadi tim riset. Kepada Prof Ina Primiana dan Prof Asep Warlan yang banyak memberikan inspirasi selama bekerjasama dalam perumusan kebijakan publik. Kepada Bappeda Provinsi Jawa Barat yang sudah memberikan kesempatan menjadi mitra begitu lama sejak tahun 2004 hingga saat ini, kepada Bapak Walikota yang memberi kesempatan menjadi anggota tim pertimbangan kebijakan. Kepada keluarga besar SOS Kinderdorf Indonesia terutama SOS Kinderdorf Lembang atas segala bantuan dan kasih sayangnya kepada kami sekeluarga, kepada para ikhwan Suryalaya khususnya Linggar atas dukungan dan doanya.

Kepada Prof Harits (Warek 1 Unisba), seluruh staf di bagian akademik dan pengembangan karir dosen, bagian SDM, terimakasih banyak atas segala bantuannya untuk kelancaran pengurusan berkas guru besar. Akhirnya, kepada Ibunda dan Bapak mertua tercinta, Kakak-kakak keluarga besar Sumedang dan adik-adik keluarga Tasik, dan suamiku Drs. H. Sutrisno Setiawan dan anak-anakku Rajab Cipta Lestari, S.Psi.,M.Psi.,Psikolog dan Cakra Buana, terima kasih tiada terkira atas segala doa yang tiada henti, dan pengorbanannya.

Terimakasih

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh



Rujukan

- Abdulrachman, Sapia Moalam. (2011). Integrating Spiritual Dimension in Sustainable Development Strategy: An Islamic perspective. *OIDA International Journal of Sustainable Development*, 2(11), 51-64.
- Abdurrahman. (2012). *Memelihara Lingkungan Dalam Ajaran Islam*. Bandung: Penerbit Rosda Karya.
- Abdurrahman, Hafidz. 2012. *Diskursus Islam Politik dan Spiritual*. Al Azhar Press
- Akhtar, Muhammad Ramzan. (1996). Towards an Islamic Approach for Environmental Balance. *Islamic Economic Studies*, 3 (2), 57 – 76.
- Al-Jayyousi, Odeh Rashed. (2012). *Islam and Sustainable Development*. Surrey: Gower Publishing, Ltd.
- Ansari, Abdul Haseeb., Jamal, Parveen, & Oseni, Umar A. (2012). Sustainable development: Islamic dimension with special reference to conservation of the environment. *Advances in Natural and Applied Sciences*, 6(5): 607-619.
- Assiri, Marco, Vincenzo Barone, Francesco Silvestri, and Mattia Tassinari. 2021. "Planning Sustainable Development of Local Productive Systems: A Methodological Approach for the Analytical Identification of Ecoregions." *Journal of Cleaner Production* 287(xxxx):125006.
- Bartlett, Robert and Walter Baber. 2005. "Ethics and Environmental Policy in Democratic Governance." *Public Integrity* 7(3):219–40.
- Becchetti, L. & Borzaga C. (2010). *The economics of social responsibility: The world of social enterprises*. Milton Park: Routledge.
- Blanc, David Le. (2015). *Towards Integration at Last? The Sustainable Development Goals as a Network of Targets*. Rio+20 Working Papers,
- Blowers, A. (1993). Environmental policy: the quest for sustainable development. *Urban Studies*, 30(4-5), Pp. 775-796
- Briassoulis, H. (2001). Sustainable development and its indicators: Through a (Planner's) Glass Darkly. *Journal of Environmental Planning and Management*, 44(3), 409-427. doi: 10.1080/09640560120046142.
- Conroy, M.M., Berke, P.R. (2004). What makes a good sustainable development plan? An analysis of factors that influence principles of sustainable development. *Environment and Planning A* 2004, 36(8): 1381-1396. <https://doi.org/10.1068/a367>
- Counsell, D. (1999). Attitudes to sustainable development in planning: Policy integration, participation and local Agenda 21, a case-study of the Hertfordshire Structure Plan. *Local Environment: The International Journal of Justice and Sustainability*, 4(1), 21-32. doi: 10.1080/13549839908725578.
- Cowell, Margaret M. 2013. "Bounce Back or Move on: Regional Resilience and Economic Development Planning." *Cities* 30(1):212–22.
- Dolley, Jonathan, Fiona Marshall, Bradley Butcher, Jeremy Reffin, James Alexander Robinson, Baris Eray, and Novi Quadrianto. 2020. "Analysing Trade-Offs and Synergies between SDGs for Urban Development, Food Security and Poverty Alleviation in Rapidly Changing Peri-Urban Areas: A Tool to Support Inclusive Urban Planning." *Sustainability Science* 15(6):1601–19.
- Hajer, M.A. (1996) Ecological modernisation as cultural politics, in: S. Lash, B. Szerszynski & B. Wynne (Eds) *Risk, Environment and Modernity* (London: Sage).
- Hayter, Roger and Stephan Nieweler. 2018. "The Local Planning-Economic Development Nexus in Transitioning Resource-Industry Towns: Reflections (Mainly) from British Columbia." *Journal of Rural Studies* 60(April 2017):82–92.
- Holden, M. (2008). The tough minded and the tender minded: A pragmatic turn for sustainable development planning and policy. *Planning Theory & Practice*, 9(4), 475-496. doi: 10.1080/14649350802481371.

- Kantemeridou, Charitini, Georgios Tsantopoulos, Stilianos Tampakis, and Paraskevi Karanikola. 2013. "Participatory Planning and Local Economic Development: A Case Study of Northeast Halkidiki." *Procedia Technology* 8(Haicta):459–64.
- Martin, Nigel and John Rice. 2014. "Sustainable Development Pathways: Determining Socially Constructed Visions for Cities." *Sustainable Development* 22(6):391–403.
- Narayanan, Y. (2013). Religion and sustainable development: Analysing the connections. *Sustainable Development*, 21(2), 131-139.
- Orhan Aström, Z. H. (2011). Paradigm shift for sustainable development: The contribution of Islamic Economics. *Journal of Economic and Social Studies*. 1(1), 73-82.
- PBB, 2105. Integrating the three dimensions of sustainable development: A framework and tools United Nations publication Copyright© United Nations 2015
- Redclift, M. (1999) Pathways to sustainability: Issues, policies and theories. In: M. Kenny & J. Meadowcroft (Eds), *Planning Sustainability*. London: Routledge.
- Roberts, P. & Chan, R. C. K. (1997). A tale of two regions: Strategic planning for sustainable development in East and West. *International Planning Studies*, 2(1): 45-62. doi: 10.1080/13563479708721668.
- SDG Guide. Chapter 1: Getting to know the Sustainable Development Goals. <https://sdg.guide/chapter-1-getting-to-know-the-sustainable-development-goals-e05b9d17801>, accessed Apr. 8, 2018
- SDG Knowledge Hub. 2019. "Guest Article: From Top-Down to Bottom-Up: Three Steps to Improving Public Participation in the 2030 Agenda | SDG Knowledge Hub | IISD." Retrieved August 29, 2021 (<https://sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/from-top-down-to-bottom-up-three-steps-to-improving-public-participation-in-the-2030-agenda/>).
- Shutkin, W. 2000. "Towards a Global/International Model for Sustainable Urban Redevelopment."
- Todaro, Michael and P. Stephen C. Smith. 2012. *Economic Development/ 11th Edition*. Accessed from <http://www.pearsonhighered.com/educator/academic/product/0,3110,0138013888,00.html> on 10th February, 2014.
- United Nations. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017: 71/313. Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. http://ggim.un.org/documents/A_RES_71_313.pdf, accessed May 10, 2018
- WCED. 1987. *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, Oslo*.
- Weitz, N. *et al.* (2014), Cross-sectoral integration in the Sustainable Development Goals: anexus approach, SEI Discussion Brief.
- Yusoff, Suhaini Mohamed, Fatimah Yusof, and Ahmad Fuzi Arshad. 2014. "An Analysis of Local Plan for Development Control at Local Planning Level in the State of Selangor." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 153:574–84.

Daftar Riwayat Hidup



Nama : Prof. Dr. Atih Rohaeti Dariah, SE., MSi
Tempat/Tanggal Lahir : Sumedang, 2 Maret 1968
Ayah : Almarhum H. Ase Suhana
Ibu : Hj. Nurhasanah
Suami : Drs. H. Sutrisno Setiawan
Anak-anak : Rajab Cipta Lestari, S.Psi.,M.Psi.,Psikolog
Cakra Buana

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun Lulus	Jenjang	Perguruan Tinggi	Jurusan/Bidang Studi
1992	Sarjana	UNPAD Bandung	Ekonomi dan Studi Pembangunan
1999	Magister	UNPAD Bandung	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
2007	Doktor	Institut Pertanian Bogor	Ekonomi Pertanian

Jabatan dalam Pengelolaan Institusi:

1. Pembantu Dekan III, Fakultas Ekonomi Unisba tahun 2000-2001
2. Ketua Prodi Ilmu Ekonomi Unisba tahun 2008-2012
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisba tahun 2016-2017
4. Wakil Rektor II Unisba tahun 2018 – saat ini

Pengalaman Profesional

1. Anggota Tim Pertimbangan Kebijakan Walikota Bandung tahun 2021
2. Pendiri dan Pengurus BMT Lathifah tahun 2009 – saat ini
3. Anggota Komite Perencana Pembangunan dan Narasumber di Bappeda Provinsi Jawa Barat 2004 – saat ini.
4. Tenaga ahli dalam perumusan kebijakan ekonomi di Bapelitbangda Kota Tasikmalaya, 2016-2019, Bappeda Kabupaten Majalengka 2014 – 2016.
5. Tenaga ahli dalam analisis KUA PPAS Kabupaten Banjarnegara tahun 2012-2018.
6. Tenaga ahli KLHS di Bappenas tahun 2010-2012.

Penelitian

2013-2014 . Pengayaan Pemikiran dan Pilihan Kebijakan Perbaikan Distribusi Pendapatan Melalui Mekanisme Pasar Dari Perspektif Ekonomi Islam. Ketua. Dikti

2014. Sustainable Development Planning In Islamic Perspective (New Structure Based on Indonesia Experiences). Ketua. Islamic Development Bank (IDB)

2015 - 2016. Kajian Perbaikan Distribusi Pendapatan Fungsional Dari Perspektif Islam. Ketua. Hibah bersaing Dikti

2018 - 2020. Sustainable Development Planning for Muslim Countries in Southeast Asia. Ketua . Kemenristek Dikti Indonesia

2020 – 2021. Probability Sustainable Economic Growth in Southeast Asia Muslim Countries. Ketua. LPPM Unisba.

Publikasi Jurnal Ilmiah

Dariah, A.R. (2020). Comparative Study of Sustainable Development Planning in Southeast Asia Countries. *International Journal of Sustainable Development and Planning*. Volume 15. No. 4, June 2020

Dariah, A.R., Mafruhah, A.Y., Hendrakusumah, E. (2019). Framework Sustainable development planning in Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series* Vol. 1375 No. 1, 2019 ISSN : 1742-6596 IOP Publishing.

Dariah, A.R. Salleh, M.S., bin Yahaia, M., Mafruhah, A.Y. (2019). Integrating Dimensions of Sustainable Development Goals (SDGs) Within Umranic Framework. *Journal of Sustainable Development* Vol. 12 no.6, 2019.

Dariah, A.R., Sundaya,Y., Nurhasanah,N. (2018). Profit Sharing among Labour, Mudharib and Shahibul Maal under Mudharabah Contract: Evidence from Indonesia. *Malaysian Journal of Economic Studies*, Volume 55 No 1, 2018

Dariah, A.R., Sundaya,Y., Nurhasanah,N. (2015). Income Distribution Measurement In Islamic Perspective. *International Journal of Advanced Research*, Volume 3 No 9, 2015

Dariah, A.R., Sundaya,Y., Malik, Z.A. (2015). Optimizing Input and Output under the Scheme of *Mudharabah*. *International Journal of Sciences and Research*, Volume 4 Issue 5, May 2015

Dariah, A.R. (2014). Development Planning In Islamic Perspective: New Structure Based on Indonesia Experiences. 'World Islamic Studies' , Volume 73 of International Proceedings of Economics Development and Research ISSN 2010-4626. 2014 IACSIT Press, Singapore

Dariah, A.R., Sundaya,Y., Malik, Z.A. (2013). Enriching the Theory of Factor Pricing and Income Distribution in Islamic Perspective. *International Journal of Sciences and Research (IJSR)* Vol 5, No 3: 872-881

Dariah, A.R. (2013). Factors Pricing Concept: Conventional Versus Islamic Economics. *Proceeding Islamic Economics and Business*, Economics Faculty Bandung Islamic University), Vol. 1 No. 1, June 2013

Dariah, A.R. (2012). Improving Social Capital of BMT (Baitul Mal Watamwil): An Experience From BMT Lathifah, Sumedang Indonesia. *The International Journal of Social Science* Vo. 4 No 1, 30th November 2012

Buku/Book Chapter

Dariah, A.R. (2016). The Shape of Islamic Sustainable Development In Book "Islamic Perspectives on Sustainable Development". Universiti Sain Malaysia & Islamic Relief Academy 2016, Birmingham, United Kingdom

Pembicara di Konferensi/Webinar/Kuliah Umum

Dariah, A.R. 2021. Karakter Pemulihan Ekonomi Kota Bandung: Smart-Sustainable-Inclusive Growth. Webinar Pemulihan Ekonomi Kota Bandung.

Dariah, A.R. 2020. Sustainable Economic Growth In Islamic Perspective. Bandung Annual International Conference 2020.

Dariah, A.R. 2020. Action Plan Non-Government Organization for SDGs Achievement in Indonesia *Guest lecturer* untuk Mata kuliah Humanomics di Fakultas Ekonomi dan Keuangan Islam,Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam. 15 September 2020 by zoom.

Dariah, A.R. 2019. Sustainable Development Planning in Islamic Perspective. Keynote Speaker at National Conference "Seminar Nasional SDGs dalam Masyarakat Islam di Asia Tenggara dengan tema: Menuju Pencapaian SDGs dalam Masyarakat Muslim". 2 Mei 2019 di Aula Universitas Gunung Jati (UGJ) Cirebon, Indonesia

Dariah, A.R. 2019. Conceptual Framework of Islamic Sustainable Development Planning. Keynote Speaker at Research Discourse Series ISDEV USM, Penang-Malaysia. 16 August 2019 bertempat di bilik pertemuan ISDEV USM, Penang-Malaysia

Dariah,A.R. 2018. Sustainable Development In Islamic Perspective. Keynote Speaker at Public Talk Sustainable Development, Universitas Sultan Sharif Ali Brunei Darussalam. 27 Oktober 2018 bertempat di auditorium Unissa, Brunei

